

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tenaga Kerja

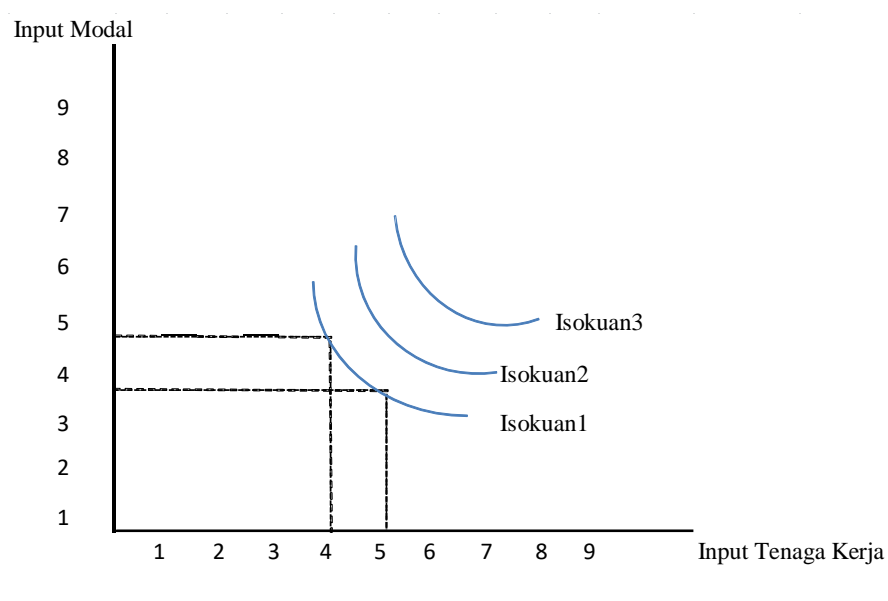
2.1.1.1 Pengertian

Tenaga Kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenagakerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlakudi Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

2.1.1.2 Permintaan Tenaga Kerja dalam Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, perusahaan tidak mampu untuk mengubah kuantitas modal yang ia gunakan dan tidak dapat menambah output kecuali dengan menambah penggunaan tenaga kerja (Arfida, 2003).

Kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan perusahaan untuk menghasilkan “ kuantitas yang sama”. Misalnya, perusahaan dapat mencapai isokuan 2 dengan cara menggunakan lima unit tenaga kerja, atau dengan cara kombinasi lainnya antara tenaga kerja dan modal yang merupakan substitusi dalam proses produksi. Pada umumnya, bila sebuah perusahaan harus secara berturut-turut mengurangi satu unit penggunaan dari satu faktor produksi, maka ia harus menggunakan secara berturut-turut jumlah yang lebih besar dari faktor produksi yang lainnya agar dapat mempertahankan kuantitas output tanpa mengalami perubahan. Fakta ini tercermin pada kurvator isokuan yang dilukiskan berbentuk cembung terhadap titik O (origin) (Arfida, 2003).



Sumber: Arfida, 2003 (disesuaikan)

Gambar 2.1 Kurva Isokuan Produksi

Setiap kuantitas produk dapat dihasilkan dengan berbagai macam kombinasi tenaga kerja dan modal. Misalnya, isokuan 2 dapat dicapai dengan 5 unit modal

dan 2 unit tenaga kerja atau dengan 4 unit modal dan 3 unit tenaga kerja. Perusahaan dapat meningkatkan outputnya dari isokuan², katakanlah menjadi isokuan 3 dengan cara meningkatkan jumlah modal yang digunakan atau dengan cara meningkatkan kedua jenis input. Apabila diberikan kebebasan penuh untuk memilih, maka pengusaha akan menghasilkan setiap jenis output dengan kombinasi modal dan tenaga kerja yang paling sedikit biayanya. Akan tetapi, karena asumsi kita bahwa perusahaan itu berada dalam jangka pendek, maka ia tidak mampu untuk mengubah kuantitas modal yang ia gunakan. Perusahaandalam jangka pendek tidak dapat menambah output kecuali dengan menambah penggunaan tenaga kerja (Arfida, 2003).

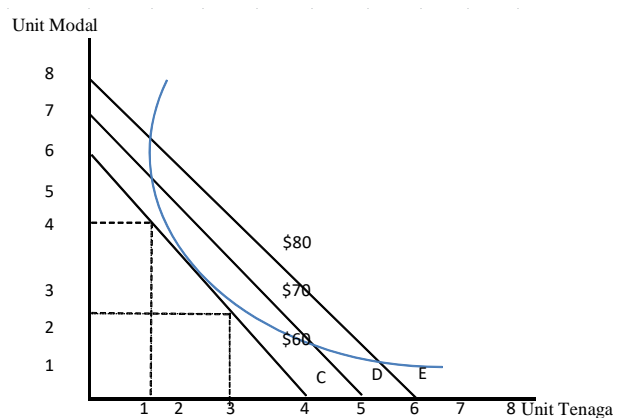
2.1.1.3 Permintaan Tenaga Kerja dalam Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, persediaan modal perusahaan tidak tetap. Perusahaan dapat memperluas atau mengecilkan pabriknya, ukuran dan peralatan. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan memilih baik berapa banyak pekerja untuk dipekerjakan dan berapa banyak pabrik dan peralatan untuk berinvestasi (George J. Borjas, 2015).

Kurva isokuan menggambarkan kemungkinan kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat output yang sama. Isokuan, oleh karena itu, menggambarkan fungsi produksi persisi dengan cara yang sama seperti kurva ketidak pedulian menggambarkan fungsi utilitas pekerja. Gambar 2.1 menggambarkan isokuan yang terkait dengan fungsi produksi $q = f(E, K)$. Isokuan berlabel q_0 memberikan semua kontribusi modal-tenaga kerja yang menghasilkan tepat q_0 unit output, dan isokuan berlabel q_1 memberikan semua kombinasi

modal-tenaga kerja menghasilkan q_1 unit.

Jangka panjang dalam teori perusahaan adalah konsep perusahaan dalam melakukan penyesuaian penuh terhadap keadaan ekonomi yang berubah. Dimisalkan perusahaan akan mencapai isokuan, maka output sebesar itu dapat dihasilkan dengan satu unit tenaga kerja yang dikombinasikan dengan empat unit modal. Perusahaan juga dapat mengkombinasikan dua unit tenaga kerja dengan tiga unit modal. Apabila pemilik perusahaan itu bebas (sebagaimana keadaan yang sesungguhnya) dalam jangka panjang untuk melihat setiap bentuk kombinasi modal dan tenaga kerja, maka kombinasi yang akan dipilih supaya dapat memaksimalkan keuntungan adalah dengan kombinasi modal dan tenaga kerja yang mana saja asal mengundang biaya paling rendah (Arfida, 2003).



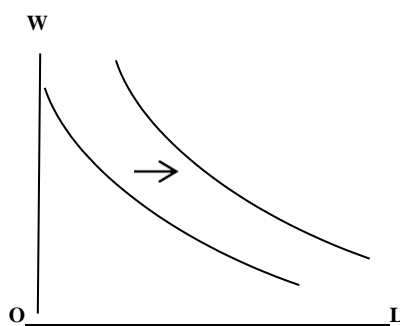
Sumber: Arfida, 2003

Gambar 2.2 Kombinasi Tenaga Kerja dan Modal yang Memberikan Biaya Paling Rendah

Kombinasi tenaga kerja dan modal yang memberikan biaya paling rendah. Perusahaan dapat mencapai isokuan dengan berbagai macam kombinasi tenaga kerja dan modal, termasuk yang diperhatikan pada titik C, D dan E. Walaupun

demikian, perusahaan sebaiknya memiliki kombinasi C, karena \$60 merupakan kombinasi paling murah.

Jika tingkat upah harus dinaikan, maka setiap kemungkinan tingkat output haruslah dihasilkan dengan tenaga kerja yang lebih sedikit dan modal yang lebih banyak. Produsen akan menggantikan modal bagi tenaga kerja dalam jangka panjang agar dapat menghasilkan setiap tingkat output dengan biaya yang rendah. Pengetahuan tentang kecenderungan perusahaan dalam jangka panjang agar dapat menghasilkan setiap tingkat output dengan biaya yang rendah. Pengetahuan tentang kecenderungan perusahaan dalam jangka panjang membantu untuk mengarahkan penggunaan suatu input yang relatif lebih murah. Hal ini memungkinkan bagi kita untuk membandingkan reaksi perusahaan dalam jangka panjang. Sebagaimana dinyatakan terdahulu, kurva perusahaan VMPP adalah kurva permintaan dalam jangka pendek akan tenaga kerja



Gambar 2.3 Kurva Permintaan Tenaga Kerja

Pertama, sehubungan dengan usaha-usaha pembangunan ekonomi nasional, biasanya beberapa sektor tumbuh dengan lambat. Akibatnya penghasilan orang yang bekerja disektor golongan pertama juga meningkat dengan cepat dibandingkan dengan penambahan penghasilan mereka yang berkerja disektor

yang pertumbuhannya lambat. Ketimpangan penghasilan seperti itu biasanya merubah pola konsumsi. Golongan yang penghasilannya bertambah dengan cepat biasanya mempunyai tambahan permintaan yang besar akan barang-barang mewah seperti mobil, TV, video, alat-alat musik, pendidikan, rekreasi, dan lain- lain. Tambahan permintaan akan barang barang tersebut menimbulkan *shift* dalam permintaan akan tenaga kerja diperusahaan-perusahaan dimana barang tersebut diproduksi.

Kedua, *shift* terhadap permintaan tenaga kerja dapat terjadi karena peningkatan produktivitas kerja. Kenyataan menunjukkan bahawa salah satu yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produktivitas kerja para karyawan. Akan tetapi seperti halnya dengan perbedan pertumbuhan dibeberapa sektor, maka peningkatan produktivitas kerja di sektor-sektor tersebut juga berbeda. Ada sektor-sektor dimana terjadi peningkatan produktivitas kerja yang tinggi sedangkan dibeberapa sektor lain produktivitas kerja bertambah dengan kecil atau tidak bertambah sama sekali.

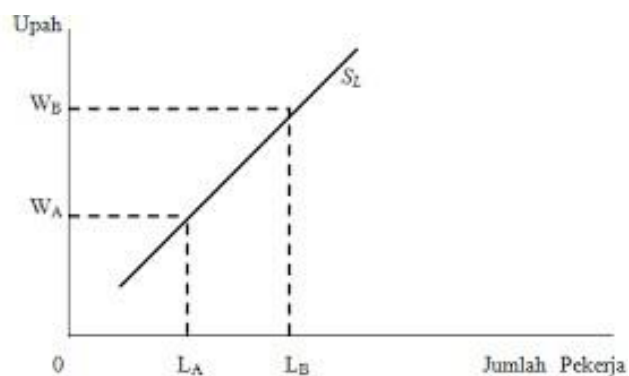
Hal ketiga yang mengakibatkan *shift* dalam permintaan akan tenaga kerja adalah perubahan dalam metode produksi. Pada tingkat akhir, permintaan akan tenaga kerja dalam jangka panjang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam metode produksi. Adanya kemajuan yang pesat dalam penggunaan komputer dan mini komputer menimbulkan permintaan yang pesat akan tenaga-tenaga dibidang tersebut. Akan tetapi tenaga-tenaga untuk pembukuan, dokumentasi dan lain-lain, menjadi relatif berkurang. Jadi perubahan metode produksi di satu pihak menambah akan permintaan tenaga kerja dalam keahlian tertentu, akan tetapi di

pihak lain mengurangi permintaan akan keahlian yang lain.

2.1.1.4 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. *Tradeoff* adalah situasi dimana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau mungkin lebih, mengorbankan salah satu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda. Penawaran tenaga kerja muncul dari *tradeoff* antara waktu kerja dan waktu luang yang dimiliki seseorang.

Kurva penawaran tenaga kerja mencerminkan bagaimana keputusan para pekerja mengenai *tradeoff* antara tenaga kerja dan waktu luang merespons perubahan biaya kesempatannya. Kurva penawaran tenaga kerja yang kemiringannya positif menandakan bahwa masyarakat merespons peningkatan upah dengan cara menikmati waktu luang yang lebih sedikit dan jam kerja yang lebih banyak.



Sumber: Bosworth *et al.*, 1996: 13.

Gambar 2.4. Kurva Penawaran Tenaga Kerja

Kurva penawaran tenaga kerja mengalami pergeseran setiap kali masyarakat mengubah jumlah jam kerja sesuai keinginan mereka pada tingkat upah tertentu. Adapun beberapa hal yang menyebabkan kurva penawaran tenaga kerja mengalami pergeseran adalah sebagai berikut:

a) Perubahan Selera

Pada tahun 1950, hanya 34% wanita yang mencari pekerjaan, angka ini meningkat menjadi 60% pada tahun 2000. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perubahan selera, atau sikap terhadap pekerjaan. Pada tahun 1950 merupakan hal yang wajar apabila seorang wanita hanya tinggal di rumah sambil mengasuh anak, tetapi saat ini lebih banyak ibu rumah tangga yang memilih untuk bekerja, dan akibatnya terjadilah peningkatan penawaran tenaga kerja.

b) Perubahan Kesempatan Alternatif

Penawaran tenaga kerja pada setiap pasar tenaga kerja bergantung pada kesempatan yang tersedia pada pasar tenaga kerja lainnya. Contoh:

Apabila upah yang diperoleh para pemetik buah pir tiba-tiba meningkat, sebagian pemetik buah pir mungkin memilih untuk beralih ke pekerjaan lain. Penawaran tenaga kerja pada pasar pemetik buah pir mengalami penurunan.

c) Migrasi

Perpindahan pekerja dari suatu wilayah ke wilayah lain, atau dari suatu negara ke negara lain, merupakan penyebab nyata dari pergeseran penawaran tenaga kerja.

Contoh:

Ketika para imigran datang ke AS, penawaran tenaga kerja di AS meningkat dan penawaran tenaga kerja di Negara asal para imigran akan menurun.

2.1.1.5 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Menurut Santoso (2012), keseimbangan pasar tenaga kerja dapat terjadi karena adanya permintaan tenaga kerja dari perusahaan dan industri dan penawaran dari tenaga kerja dipasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja terbentuk karena adanya beberapa kumpulan perusahaan dan industri yang berada dalam suatu perekonomian.

Menurut Bellate, Don, and Mark Jackson dalam Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1990) yang berjudul Ekonomi Ketenagakerjaan. Keseimbangan pasar tenaga kerja dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

- A. Keseimbangan dalam Pasar Tenaga Kerja *Single Competitif*
- B. Keseimbangan Kompetitif antar Pasar Tenaga Kerja
- C. Keseimbangan dalam Pasar Tenaga Kerja Monopsoni
- D. Keseimbangan dalam Pasar Tenaga Kerja Monopoli

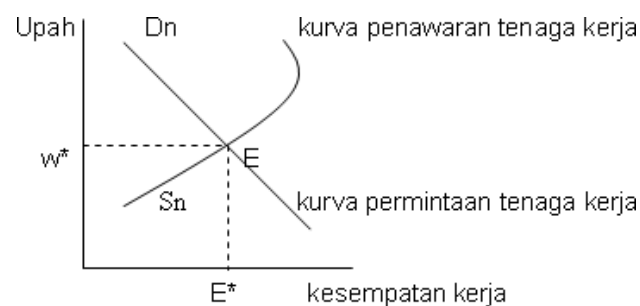
Adapun dalam penelitian ini sesuai relevansinya penulis hanya akan membahas dua yaitu:

- A. Keseimbangan dalam Pasar Tenaga Kerja *Single Competitif* dan
- B. Keseimbangan Kompetitif antar Pasar Tenaga Kerja

- A. Keseimbangan dalam Pasar Tenaga Kerja *Single Competitif*

Kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah jam kerja dari pekerja pada berbagai tingkat upah. Sedangkan kurva permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah jam kerja yang digunakan oleh perusahaan pada berbagai tingkat upah. Keseimbangan terjadi pada saat penawaran tenaga kerja sama

dengan permintaan tenaga kerja yaitu di titik upah keseimbangan w^* dan jumlah jam kerja sebanyak E^* . Setelah tingkat upah keseimbangan tercapai, setiap perusahaan di dalam industri berusaha mempekerjakan orang sampai pada titik dimana nilai marjinal produk tenaga kerja (*value of marginal product of labor*) sama dengan upah di pasar kerja yang kompetitif yaitu di titik E.

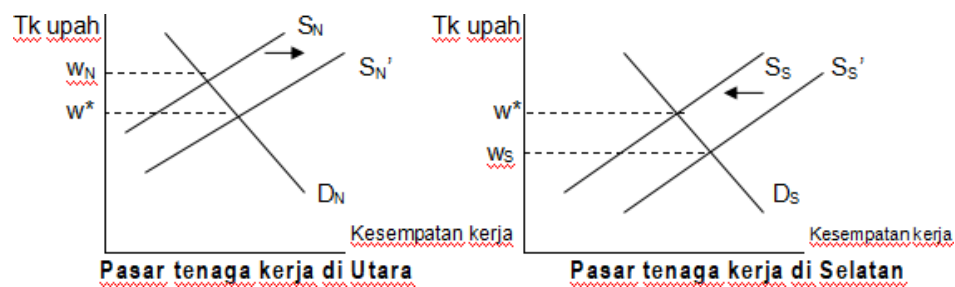


Gambar 2.5. Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja *Single Competitif*

B. Keseimbangan Kompetitif antar Pasar Tenaga Kerja

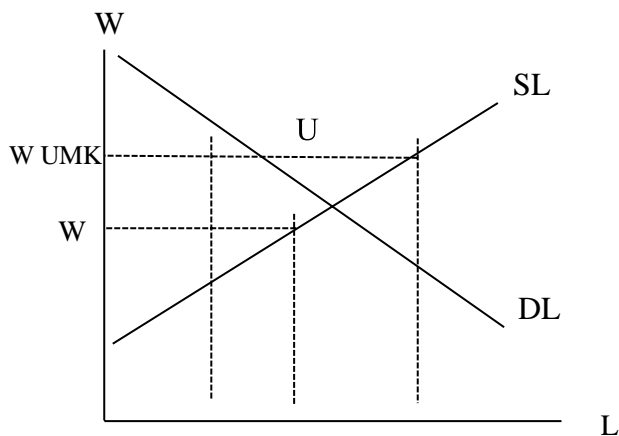
Bagaimana keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi bila di daerah utara mempunyai upah yang lebih tinggi dari daerah selatan? Maka diasumsikan dua pasar mempekerjakan pekerja yang memiliki ketrampilan yang sama sehingga orang yang bekerja di daerah Utara memiliki substitusi yang sempurna dengan daerah di Selatan. Upah keseimbangan di daerah Utara w_N melebihi upah keseimbangan di daerah Selatan w_S . Kurva permintaan dan penawaran di masing-masing pasar yaitu S_N dan D_N untuk daerah Utara sedangkan S_S dan D_S untuk daerah Selatan. Pekerja di daerah Selatan melihat upah di daerah Utara lebih besar, akan berpindah untuk bekerja di Utara. Penghasilan yang besar

menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih besar. Sebaliknya perusahaan melihat adanya perbedaan upah di kedua daerah, akan berpindah ke daerah Selatan yang memiliki karakteristik tingkat upah yang lebih rendah dibandingkan di Utara, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan lebih besar dengan mempekerjakan pekerja yang lebih murah. Jika pekerja berpindah antar daerah dengan bebas, perpindahan pekerja (migrasi) akan mengubah kurva penawaran baik di daerah Utara maupun Selatan. Di daerah Selatan, kurva penawaran tenaga kerja akan bergeser ke kiri (ke S_S') sampai sebagian pekerja di daerah Selatan meninggalkan daerahnya menuju daerah Utara. Akibatnya karena pekerja sangat langka di daerah Selatan, upah pekerja mengalami kenaikan. Sebaliknya di daerah Utara, kurva penawaran tenaga kerja akan bergeser ke kanan (ke S_N'), sebagai akibat pekerja di daerah Selatan terus berdatangan. Dampaknya, upah di daerah Utara mengalami penurunan. Jika ada kebebasan bagi pekerja untuk berpindah dan kebebasan untuk keluar atau masuk ke pasar, maka dampaknya perekonomian nasional akan menghasilkan tingkat upah tunggal yaitu sebesar w^* .



Gambar 2.6. Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja Kompetitif

2.1.1.6 Konsep Upah Minimum



Gambar 2.7 Kurva Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Upah minimum adalah sebuah kontroversi, bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "living wage", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya.

Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang low skilled. Upah minimum dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional (Kusnaini, D, 1998). Bagi yang tidak setuju dengan upah minimum mengemukakan alasan bahwa penetapan upah minimum mengakibatkan naiknya pengangguran dan juga memungkinkan kecurangan dalam pelaksanaan yang selanjutnya berpengaruh pada penurunan tingkat upah dalam suatu sektor yang tidak terjangkau kebijakan

upah minimum. Disamping itu penetapan upah minimum tidak memiliki target yang jelas dalam pengurangan kemiskinan. Dari perbedaan-perbedaan pandangan tersebut kita bisa melacak akibat-akibat dari penetapan upah minimum yang mungkin timbul –dengan beberapa asumsi, pertama bahwa semua sektor dan semua tenaga kerja terjatkau kebijakan upah minimum, kedua konsekuensi potensial dari efek shock terhadap pekerja diterapkan- Dalam sejarah perkembangannya terdapat berbagai teori untuk menentukan tingkat upah berlaku, penganut klasik menyatakan bahwa upah ditentukan oleh produktivitas marginal tetapi Marshall dan juga Hicks menyatakan bahwa produktivitas marjinal hanyalah menentukan permintaan terhadap buruh saja, jadi bukan terhadap penawaran tenaga kerja. Namun akhirnya permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan tingkat upah yang berlaku. Isu umum dalam pembahasan mengenai pasar kerja selalu diasumsikan terdapatnya keseimbangan antara penawaran dan permintaan pekerja pada tingkat tertentu dengan jumlah pekerja tertentu pula. Namun adakalanya keseimbangan ini tidak selamanya menunjukkan tingkat upah yang terjadi di pasar kerja karena dalam pelaksanaannya terdapat campur tangan pemerintah atau karena ada yang menentukan tingkat upah minimum. Dalam jangka panjang, sebagian pengurangan permintaan pekerja bersumber dari berkurangnya jumlah perusahaan, dan sebagian lagi bersumber dari perubahan jumlah pekerja yang diserap masing-masing perusahaan. Jumlah perusahaan bisa berkurang karena pemberlakuan tingkat upah minimum tidak bisa ditanggung oleh semua perusahaan. Hanya perusahaan yang sanggup menanggung upah minimum -atau yang berhasil menyiasati peraturan itu-yang akan bertahan.

Sebagai contoh anggap saja sejumlah perusahaan tertentu membayar upah lebih tinggi dari pada Wm, khusus untuk pekerja unggul. Pemberlakuan tingkat upah minimum akan meningkatkan upah rata-rata, tapi tidak akan memacu kualitas pekerja secara keseluruhan. Akibatnya perusahaan yang menyerap pekerja kualitas lebih rendah, tapi harus membayar upah lebih tinggi, akan semakin sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sejak semula memberi upah tinggi tapi memang kualitas pekerjanya unggul.

Dampak pemberlakuan hukum upah minimum tergantung pada kadar keseriusan pelaksanaannya. Jika hukum itu tidak dipaksakan dan diawasi pelaksanaannya, maka takkan ada perubahan yang berarti. Analisis mengenai upah minimum identik dengan analisis kontrol harga lainnya.-upah adalah harga tenaga kerja-meskipun dampak pemberlakuan tingkat upah minimum gampang dilihat karena ketentuan itu secara jelas menyebutkan bidang kerja apa saja yang upah minimumnya diatur dan perkecualian apa saja yang masih mungkin diperbolehkan-tidaklah berarti pemberlakuan upah minimum semacam itu selalu efektif. Selalu saja ada cara untuk menyasati atau mengurangi efektivitas hukum upah minimum. Sebagai contoh, jika sebelumnya para pekerja berupah rendah memperoleh tunjangan atau imbalan tambahan, seperti makan siang murah, tiket murah untuk pertunjukan atau pertandingan bola, maka setelah hukum upah minimum diberlakukan, perusahaan mengurangi tunjangan-tunjangan tambahan semacam itu sehingga pada akhirnya pengeluarannya untuk pekerja tidak banyak meningkat, dan total pendapatan para pekerja itu juga tidak banyak bertambah. Lebih dan itu perusahaan masih memiliki segudang cara untuk mengimbangi

kenaikan pengeluaran upah untuk para pekerjanya. Misalnya perusahaan mengharuskan pekerjanya membeli berbagai barang keperluan di toko milik perusahaan, atau tinggal dengan uang sewa -tentunya dirumah-rumah milik perusahaan-. Tidak mustahil keuntungan dari toko atau perumahan perusahaan tersebut melebihi biaya marginalnya, sehingga praktis pengeluaran perusahaan untuk kenaikan upah terimbangi. Dengan demikian, meskipun pemerintah memberlakukan tingkat upah minimum, para pekerja belum tentu memperoleh upah aktual minimum. Metode lainnya adalah merekrut pekerja dari sanak famili atau kalangan dekat pemilik perusahaan. Lewat metode ini perusahaan dapat membayar lebih rendah dari tingkat upah minimum, dan itu terbebas dari pemantauan departemen tenaga kerja. Cara-cara itu merupakan penjelasan mengapa toko-toko kelontong dan restoran kecil mampu bersaing dengan yang lebih besar dan biasanya lebih efisien. Binatu yang dikelola oleh suami istri pensiunan bisa menyaingi perusahaan mata rantai binatu yang lebih efisien, karena "pekerja" di binatu pasangan itu adalah diri mereka sendiri yang tidak perlu "dibayar" pada tingkat upah tertentu. Pemberlakuan upah minimum juga bisa menjadi tidak efektif kalau masih tertumpu pada asumsi umum bahwaseluruh pekerja itu homogen dan tingkat upah minimum berlaku bagi segenap pekerja. Dalam pekerja-pekerja itu tidak homogen, melainkan bermacam-macam, dan tingkat upah minimum biasanya hanya diperuntukkan untuk kelompok pekerja tertentu, dalam kadar yang bervariasi. Jadi disini takkan terlihat pengaruh pemberlakuan upah minimum terhadap total employment, melainkan hanya pada keiompok-kelompok tertentu yang mendapat perlindungan hukum upah

minimum. Atau keiompok-kelompok yang benar-benar menerima pengaruh dari hukum tersebut. Pemberlakuan upah minimum justru merugikan keiompok-kelompok tertentu. Peraturan upah minimum membatasi peluang kerja bagi mereka yang tidak mempunyai keahlian. Pihak perusahaan ternyata kemudian menaikkan keahlian atau ketrampilan dan semakin padat modal; selama memungkinkan mereka lebih mengintensifkan pemakaian modal daripada tenaga kerja. Disamping itu, adanya peraturan upah minimum justru terkadang membatalkan niat perusahaan merekrut pekerja non ahli dan membekalinya dengan pelatihan kerja atau ketrampilan khusus.

2.1.2 Ekonomi Pariwisata

2.1.2.1 Pengertian

Menurut Suartini (2013), Ekonomi pariwisata adalah kegiatan yang berhubungan dengan fenomena pariwisata untuk memaksimalkan sumber daya berupa modal, manusia, dan alam dengan harapan memperoleh hasil produk pariwisata berupa barang dan jasa yang maksimal (Suartini, 2013).

2.1.2.2 Jenis-jenis Pariwisata

Berbicara tentang kepariwisataan tidak lepas dari jenis-jenis pariwisata dan macam-macam objek wisata. Jawa Barat merupakan daerah yang mempunyai daya tarik wisata dengan jenis wisata alam, budaya maupun buatan. Namun, yang paling dominan jenis wisata yang ada di Jawa Barat adalah wisata alam dan budaya mengingat letak geografis Jawa Barat yang terangkum dalam sejarah Gunung Sunda, termasuk hutan, sungai, laut dan dengan budaya yang

berpengaruh yaitu budaya Sunda Priangan, budaya pesisir dan pengaruh budaya kolonial. Adapun jenis-jenis pariwisata menurut Pendit (2003) dalam buku Ilmu Pengetahuan Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana adalah :

a. Wisata Budaya

Seorang melakukan perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat. Sering perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan kegiatan budaya.

b. Wisata Kesehatan

Hal ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat tinggalnya sehingga bisa mengobati kelelahan-kelelahan jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mandi disumber air panas atau tempat menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

c. Wisata Olah Raga

Ini dimaksudkan dengan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga disuatu tempat atau negara, seperti Asia Games, Olimpiade, ThomasCup, Uber Cup dan lain-lain.

d. Wisata Komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersil seperti pameran industri, pameran dagang,

dan sebagainya. Tidak jarang pameran atau pekan raya ini dimeriahkan dengan berbagai macam atraksi dan pertunjukan kesenian.

e. Wisata Industri

Wisata industri adalah perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang ke suatu kompleks satu daerah perindustrian dimana pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar, dengan 9 tujuan dan maksud untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

f. Wisata Politik

Wisata politik adalah perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam pariwisata kegiatan politik, misalnya ulang tahun perayaan 17 Agustus di Jakarta, Penobatan Ratu Inggris di London, dan sebagainya.

g. Wisata Konvensi

Berbagai negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya.

h. Wisata Sosial

Wisata sosial adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan misalnya buruh, petani, atau mahasiswa.

i. Wisata Pertanian

Wisata pertanian adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan dan sebagainya, dimana wisatawan

rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk studi atau sekedar melihat-lihat sekelilingnya sambil menikmati segarnya tanaman beranekaragam dan suburnya pembibitan 10 berbagai jenis sayur mayur dan palawi jadi sekitar perkebunan yang di kunjungi.

j. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga air, seperti di danau, pantai atau memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, berkeliling melihat tamanlaut dengan pemandangan yang indah dari permukaan air, serta berbagai rekreasi perairan.

k. Wisata Cagar Alam

Jenis wisata ini banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan wisata dengan jalan mengatur wisata ketempat cagar alam atau hutan lindung.

l. Wisata Buru

Jenis wisata ini banyak dilakukan dinegeri yang memiliki daerah atau tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah yang digalakan oleh agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru kedaerah atau hutan.

m. Wisata Pilgrim

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat- istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat yang dilakukan baik perorangan maupun rombongan yang berkunjung ketempat suci, kemakam- makam orang besar atau pemimpin 11 yang diagungkan, kebukit atau gunung

yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda. Wisata Pilgrim ini banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman dan tidak jarang pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan melimpah. Ditanah air kita banyak tempat suci atau keramat yang dikunjungi oleh umat-umat beragama tertentu, misalnya seperti Candi Borobudur, Prambanan, Pura Besakih di Bali, Sendang sono di Jawa Tengah, makam Wali Songo, dan sebagainya

n. **Wisata Bulan Madu**

Wisata bulan madu adalah perjalanan yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru yang diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan dengan fasilitas yang istimewa atau khusus yang sedang berbulan madu dengan fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka, seperti kamar pengantin di hotel yang khusus disediakan dengan peralatan yang serba istimewa.

o. **Wisata Petualangan**

Wisata petualangan adalah jenis wisata yang melakukan kegiatan wisata seperti masuk hutan belantara yang tadinya belum pernah dijelajah, mendakitebing yang terjal, terjun ke dalam sungai yang curam, arung jeram menyusuri goa dan susur pantai.

2.1.2.3 Faktor Faktor yang mempengaruhi Pariwisata

Jawa Barat sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pariwisata yang dinikmati oleh masyarakat lokal maupun internasional. Karena banyak faktor yang mendukung terciptanya pariwisata di Jawa Barat. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pariwisata di Indonesia menurut Sudi Rahayu dan Sri Widodo

Soedarso (2016) dalam Penerbit Manggu Makmur Tanjung Lestari yang berjudul *Bisnis Kreatif dan Inovatif di Era Globalisasi*

- a. Memiliki banyak objek pariwisata di berbagai daerah.
- b. Memiliki alam yang sangat indah.
- c. Memiliki berbagai penginggalan sejarah pada masa lalu.
- d. Memiliki berbagai budaya yang unik.
- e. Rakyat yang ramah tamah.

Objek wisata yang baik adalah berbagai objek wisata yang menarik dan memiliki, serta didukung oleh fasilitas-fasilitas sosial yang dibutuhkan pada objek wisata antara alin:

- a. Penginapan yang memadai serta terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat dengan latar sosial ekonomi yang berbeda.
- b. Fasilitas olah raga dan sarana ibadah yang layak.
- c. Fasilitas pemandu wisata, yang senantiasa siap untuk mengantar dan memberikan penjelasan kepada para wisatawan.
- d. Keamanan dan kenyamanan para wisatawan senantiasa terjaga.
- e. Terdapat areal penjualan (souvenir), baik berupa barang-barang maupun makana khas yang dapat dibeli untuk oleh-oleh wisatawan.

Prasarana transportasi darat terdiri atas jalur kereta api, dan jalan raya.

Berdasarkan keterhubungannya jalur jalan raya dibedakan menjadi :

- a. Jalan negara, yaitu jalan yang menghubungkan antar ibukota provinsi.
- b. Jalan provinsi, yaitu jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota.

- c. Jalan kabupaten atau kota, yaitu jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten atau kota dengan ibukota kecamatan.
- d. Jalan desa, yaitu jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan desa-desa disekitarnya.

2.1.3 Hubungan Antara Jumlah Objek Wisata dengan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata

Menurut Simanjuntak (2001), kesempatan kerja adalah besarnya permintaan perusahaan akan tenaga kerja yang didasarkan atas permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut. Pembangunan Objek wisata pada sektor pariwisata merupakan salah satu usaha yang dapat ditempuh untuk memperluas kesempatan kerja. Sektor pariwisata mampu menyerap tenaga kerja melalui terbukanya lapangan pekerjaan baru di sekitar obyek wisata seperti adanya jasa penginapan atau *homestay*, usaha warung makan dan minuman atau restoran, toko souvenir dari daerah tersebut, jasa pemandu, fotografi, menjadi pegawai pengusaha wisata, dan kegiatan lainnya yang dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat (Suwanto, 2004).

2.1.4 Hubungan Antara Jumlah Wisatawan dengan penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata

Secara teoritis (apriori) adalah Ida Austriana (2005), semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan

makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalann wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada didaerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka pendapatan sektor pariwisata juga akan semakin meningkat. Jika jumlah wisatawan meningkat maka pengusaha akan melakukan investasi pada sarana dan prasarana pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan dan mengakomondirnya. Hal ini akan membuat dibutuhkanya tenaga kerja untuk berkerja pada lapangan pekerjaan baru tersebut sehingga penyerapan tenaga kerja akan meningkat.

2.1.5 Hubungan Antara Jumlah Hotel dengan Penyerapan tenaga Kerja Sektor Pariwisata

Penjelasan Hotel menurut Drs. Agus Sulastiyono, M.Si dalam bukunya yang berjudul “Teknik dan Prosedur Divisi Kamar Pada Bidang Hotel” dalam seri “Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi” yang terbit tahun 2006 menjelaskan bahwa hotel adalah perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan menginap untuk orang-orang yang melakukan perjalanan. Dikelola oleh pemilik atau ownernya dengan layanan tempat tidur beserta fasilitasnya makanan dan minuman serta fasilitas lengkap lainnya. Untuk dapat menggunakan layanan yang disediakan oleh pemilik hotel menurut Sulastiyono, seseorang harus membayar dengan tarif atau harga yang sudah ditentukan.

Dalam industri perhotelan tingkat upah minimum regional (UMR) berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja karena tingkat UMR sangat menentukan seberapa banyak suatu perusahaan mampu menyerap tenaga kerja. UMR menentukan tingkat kemampuan hotel yang ada di Provinsi Jawa Barat dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Adanya peningkatan UMR yang ditentukan pemerintah harus diikuti oleh peningkatan pendapatan hotel. Sehingga hotel mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang tinggi.

Untuk menunjang dan memaksimalkan pelayanan bagi para wisatawan di sejumlah hotel yang ada baik kerjasama dengan perusahaan swasta maupun pemerintah, maka kebijaksanaan seperti promosi, pelayanan mutu, dan mutu objek wisata secara terpadu dilaksanakan sebagai upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dan domestik sehingga diharapkan dapat memperbanyak kesempatan kerja dan memperluas lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi (Nuraini, 2017).

2.1.6 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Daerah Dalam Bidang Infrastruktur (Belanja Modal) dengan Penyerapan tenaga Kerja Sektor Pariwisata

Kodoatie dalam Prasetyo & Firdaus, (2009) mengartikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan oleh agen publik yang

dilakukan pemerintah dalam penyediaan fasilitas publik berupa penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk tujuan ekonomi sosial. *The World Bank* (1994), mengklasifikasikan infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi adalah Infrastruktur berupa fisik untuk menunjang kegiatan ekonomi, terdiri dari (*public utilities*) tenaga kerja, gas, air, sanitasi, telekomunikasi, (*public work*) jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase (*transportation sector*) jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan lain sebagainya.
2. Infrastruktur sosial, yang termasuk dalam katagori ini adalah Pendidikan, kesehatan dan perumahan.
3. Infrastruktur administrasi terdiri dari penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi.

Pengeluaran pemerintah setiap tahun selalu meningkat, di hampir seluruh macam kegiatan ekonomi. Semakin besar peran pemerintah maka semakin besar pula pengeluarannya dalam proporsi pendapatan nasional. Dalam hubungan ini, Adolp Wagner mengemukakan hukum yang disebut dengan "*Law of ever increasing state activity*". (hukum tentang kegiatan pemerintah selalu meningkat). (Suparmoko, 2000)

Dalam kehidupan sehari-hari infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dapat menunjang proses pelaksanaan kegiatan ekonomi. Sehingga dapat menyerap jumlah tenaga kerja pada sektor pariwisata dan juga mengefisienkan masyarakat

dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Keberadaan pariwisata dalam suatu wilayah akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian, sehingga pemerintah memiliki peran dalam peningkatan pariwisata. Sektor Pariwisata bukan industri yang berdiri sendiri, akan tetapi didukung oleh beberapa sektor ekonomi terkait salah satunya dalam segi infrastruktur. Oleh karena itu, untuk mengetahui peranan sektor pariwisata dalam perekonomian nasional tidak dapat dilakukan secara langsung, peranan itu diperoleh melalui identifikasi semua sektor ekonomi yang terkait dengan pariwisata, seperti perikanan, pertanian, berbagai macam industri pangan, hotel, tekstil dan lain-lain (Hermawan, 2012).

2.1.7 Hubungan Antara UMK dengan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata

Menurut UU no 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Besarnya upah ditentukan berdasarkan perjanjian antara pengusaha dengan pekerja atau serikat kerja. Sesuai dengan penelitian Kuncoro (2002), bahwa besarnya tenaga kerja yang diserap dipengaruhi oleh tingkat upah riil. Menurut teori permintaan tenaga kerja, kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila

tingkat upah naik, sedangkan input lainnya tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari pada input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang harganya relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu bertujuan sebagai perbandingan dalam pencarian data dan kajian yang terkait dengan tema yang akan diteliti. Penelitian terdahulu ini digunakan peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitian.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbandingan
1	Husriatun Putri (2019) “ Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Infrastruktur, Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2011-2015 ”	Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat. Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah Daerah • Sektor Infrastruktur • Sektor Pertanian • Sektor Pariwisata • Pendapatan Asli Daerah (PAD) 	Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat besar dan sektor-sektor kontribusi kecil terhadap pertumbuhan ekonomi.	Dalam penelitian ini menggunakan Teori dan variabel Dependen yang sama namun menggunakan metode analisis yang berbeda, yaitu model analisis linear berganda. Tempatnya di NTB

2	Rangga Bhadrika Aryadi (2019) “ Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Perhotelan Di Malang Raya (Tahun 2007-2016) ”.	<p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Kerja yang diserap langsung pada Sektor Perhotelan. <p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Hotel • Jumlah Kunjungan Wisatawan • Upah Minimum 	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Variabel jumlah hotel berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja 2) Variabel jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 3) Variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja	Penelitian ini sama-sama menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan data panel namun dengan objek variabel yang berbeda. Tempatnya di Malang
3	Diah Widyawati dan Muh.Nurhadi (2019) yang berjudul “ Dampak Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal Dan Informal: Analisis Spasial ”	<p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan Tenaga Kerja <p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upah Minimum 	Dari hasil kriteria model, model spasial lebih baik dalam estimasi dibanding model tanpa efek spasial. Sedangkan hasil perbandingan estimasi, model dengan efek spasial menghasilkan dampak kenaikan upah minimum pada penurunan penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal yang lebih besar dibanding tanpa efek spasial,	penelitian ini menggunakan variabel yang sama, namun menggunakan Metode Penelitian yang berbeda, dengan memakai Uji Dependensi Spasial Labour Market

4	Ayu Ratih Sasmita Windayani, Made Kembar Sri Budhi (2017) “Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Pengeluaran Wisatawan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali”	Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Kerja yang diserap langsung pada industri Pariwisata. • Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan Wisatawan • Tingkat Hunian Hotel • Wisatawan 	dan kesimpulan bahwa Kunjungan Pengeluaran wisatawan wisatawan tidak berpengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali, sedangkan tingkat hunian hotel berpengaruh langsung dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.	Penelitian ini sama-sama Membahas mengenai Industri Pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja, namun menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Tempatnya di Bali.
5	Addin Maulana (2016) “Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Perjalanan Wisatawan Nusantara Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Indonesia”	Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Lapangan Kerja di Sektor Pariwisata. Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik 	Berdasarkan hasil yang diperoleh, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap jumlah lapangan kerja di sektor pariwisata.	Penelitian ini sama-sama Membahas mengenai Industri Pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja, namun menggunakan metode analisis linear berganda.
6	Lia Ardiani Windriyaningrum (2013) Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, dan Jumlah Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus Tahun 1981- 2011.	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> •Tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan jumlah objek wisata. Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> •Pendapatan Kabupaten Kudus pada sektor pariwisata 	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus	Model analisis penelitian ini menggunakan model analisis linear berganda, sedangkan yang saya gunakan menggunakan model analisis data panel. Tempatnya di Kudus

7	<p>Femy Nadia Rahma, Herniwati Retno Handayani (2013)</p> <p>"Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus"</p>	<p>Variabel Dependen: penerimaan Kabupaten Kudus pada sektor pariwisata</p> <p>Variable Independen: jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata dan pendapatan perkapita □</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata dan pendapatan perkapita memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus.</p>	<p>Hanya menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata, dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Kudus tanpa melakukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui penyebab yang lebih spesifik. Tempatnya di Kudus.</p>
8	<p>Turminijati Budi Utami (2009), dengan judul "Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto, Angkatan Kerja dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember".</p>	<p>Variabel Dependen: Kesempatan Kerja</p> <p>Variabel Independen: Upah minimum, PDRB, Angkatan kerja dan Investasi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember. Sedangkan variabel PDRB, angkatan kerja dan investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember.</p>	<p>Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode linear berganda, adapun teknis analisis menggunakan metode OLS(ordinary least square). Tempatnya di Jember</p>

9	Tanti Siti Rochmani (2016), dengan judul “ Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2014 ”.	Variabel Dependen Penyerapan Tenaga Kerja Variabel Independen: Laju pertumbuhan sektor industri, Upah dan Jumlah unit usaha.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan upah minimum Kabupaten / Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan, jumlah unit industri tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah.	Penelitian ini menggunakan objek variabel dependen yang berbeda namun memakai variabel Independen dan metode penelitian yang sama, dengan menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan data panel. Tempatnya di Jawa Tengah.
10	Mbaiwa (2005) Enclave Tourism and Its Social-Economic Impacts in The Okavango Delta, Bostwana	Variabel Dependen Hotel dan resto Tingkat pendapatan Jumlah wisatawan Variabel Independen Penyerapan tenaga kerja	Hotel dan restoran, jumlah wisatawan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.	Penelitian ini sama-sama Membahas mengenai Industri Pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja, namun menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Tempatnya di Bostwan

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam mendorong pendapatan suatu daerah. Pariwisata juga mempunyai dampak bagi penyerapan tenaga kerja. Selain itu pariwisata juga membuat Indonesia bisa dikenal oleh dunia karena pesona wisata yang dimiliki Indonesia. Pariwisata juga mendorong masyarakatnya peduli akan budaya dan kekayaan yang dimiliki untuk dijaga dan dilestarikan.

Salah satu faktor yang membuat wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah adalah karena adanya objek wisata yang menarik untuk dikunjungi di daerah tersebut. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menciptakan atau membuka objek-objek wisata yang menarik untuk dikunjungi (Nasrull, 2010).

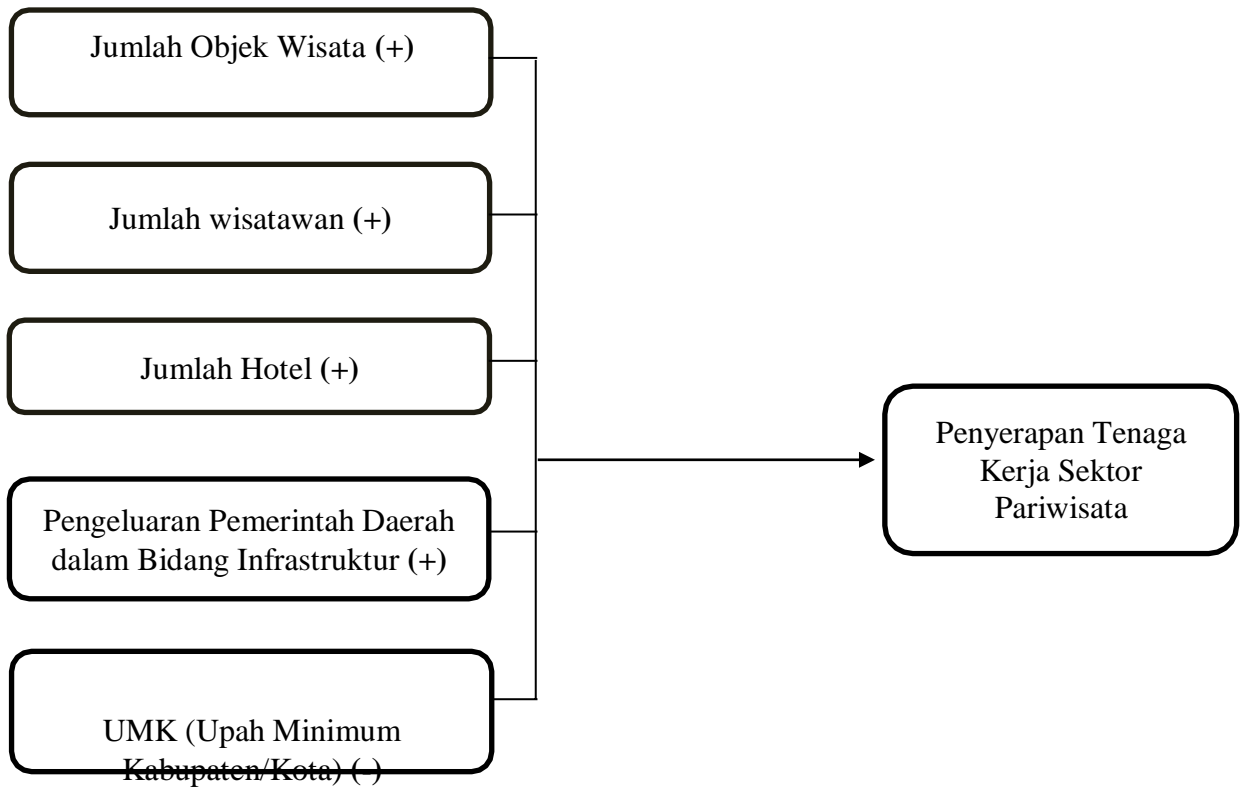
Demikian semakin banyak objek wisata semakin banyak penyerapan tenaga kerja. Banyaknya objek wisata yang menyediakan pelayanan untuk tinggal beberapa saat di suatu daerah dengan memberikan fasilitas hotel. Semakin banyak hotel yang ada di suatu daerah, maka akan meningkatkan jumlah wisatawan untuk datang dan berwisata di daerah tersebut. Maka dari itu, Jumlah hotel merupakan salah satu faktor penunjang dalam mempengaruhi pendapatan perkapita dari sektor pariwisata.

Upah merupakan hak pekerjaan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan.

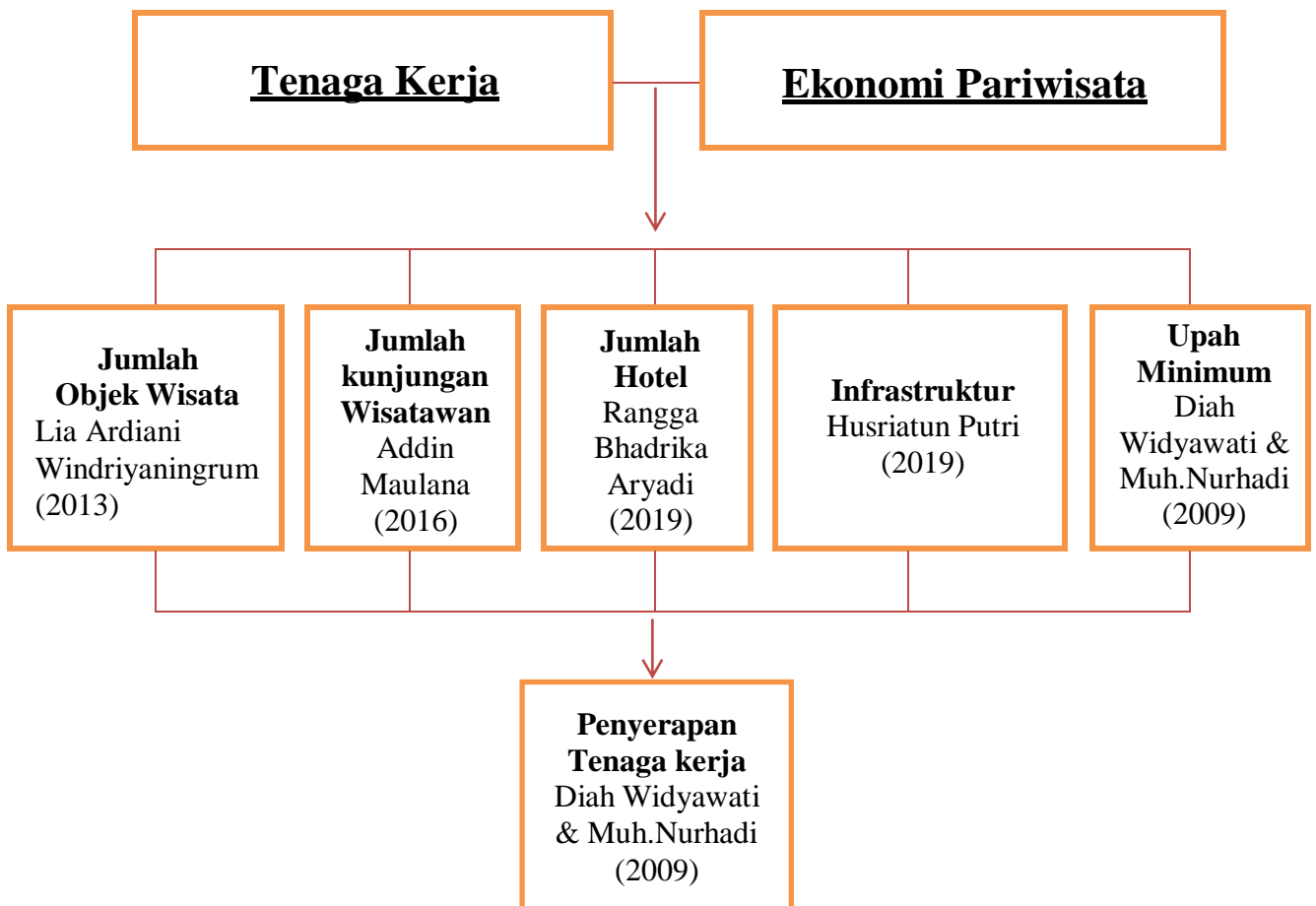
Kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik, sedangkan input lainnya tetap, maka mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang harganya relative mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

Jawa Barat memiliki banyak potensi pariwisata berupa objek wisata, hotel yang menarik bagi para wisatawan nusantara maupun mancanegara yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap Penyerapan tenaga kerja.

Pada penelitian ini menganalisis pengaruh sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja di seluruh Kota-Kota di Jawa Barat dengan variable bebas (independen) adalah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Pengeluaran Pemerintah Daerah dalam Bidang Infrastruktur, serta Upah Minimum Kota/Kabupaten . Variabel terikat (dependen) adalah Tenaga Kerja terserap. Pada peneliatian di dapatkan hasil bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan kecuali variabel Upah Minimum Kota/Kabupaten berpengaruh tidak signifikan.



Gambar 2.8. Kerangka Pemikiran 1



Gambar 2.9. Kerangka Pemikiran 2

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang mempunyai sifat sementara terhadap masalah pada penelitian sampai terbukti akurat dengan melalui pengumpulan data disertai dengan pengolahan data. Dalam penelitian ini, Hipotesisnya adalah:

1. Diduga Jumlah objek wisata berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata di Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Diduga Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata di Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Diduga Jumlah hotel berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata di Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Diduga Pengeluaran pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur (belanja modal) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata di Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat.
5. Diduga Upah minimum Kabupaten/ Kota berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata di Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat.